

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesadaran akan kebutuhan terhadap informasi publik yang harus dipenuhi lembaga negara termasuk DPR RI. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana peran TVR Parlemen untuk mewujudkan *Open Parliament* dalam hal ini melalui penggunaan *Youtube* DPR RI untuk menyediakan atau menyalurkan informasi publik kepada masyarakat. Hal tersebut juga didorong dari adanya tuntutan dari masyarakat terhadap lembaga negara yang lebih terbuka, komitmen DPR RI dalam menjalankan kebijakan *Open Parliament* telah berlangsung lama sejak 2020. TVR Parlemen menjadi salah satu aktor yang berperan dalam menyediakan informasi publik dengan *Youtube* DPR RI sebagai media penyampaian. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel. Penelitian ini menganalisis peran TVR Parlemen dalam mewujudkan *Open Parliament* melalui penyediaan informasi publik pada *Youtube* DPR RI.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dapat disimpulkan bahwa implementasi yang dilakukan telah berjalan secara prosedural namun belum mampu diberlakukan dengan ideal secara substansial. Keterbukaan yang dilakukan pada implementasi kebijakan *Open Parliament* adalah keterbukaan yang semu, sebab akses terhadap informasi telah dibuka secara luas melalui siaran langsung (*live streaming*) rapat-rapat dewan, tetapi konten yang disajikan kepada masyarakat tersebut telah melalui penyaringan yang ketat guna menjaga citra lembaga. Hal tersebut disebabkan oleh adanya distorsi komunikasi dalam implementasi kebijakan, sehingga TVR Parlemen berada pada dua peran dilematis yang harus dijalankan yakni sebagai penyedia informasi yang transparan dan sebagai instrumen hubungan masyarakat yang menganut prinsip jurnalisme positif sebagai propaganda lembaga. Dampaknya, wujud transparansi yang hadir

adalah transparansi yang terkontrol guna menghindari isu-isu sensitif atau negatif, yang berpengaruh terhadap turunnya kepercayaan publik pada objektivitas informasi yang diberikan.

Disisi lain, terdapat ketimpangan yang signifikan antara kualitas sumber daya dengan dukungan teknologi. Dedikasi dan komitmen yang tinggi selalu muncul di setiap individu pegawai TVR Parlemen, para pegawai senantiasa menunjukkan loyalitas hingga bersedia bekerja di luar jam kerja untuk memastikan informasi yang disajikan kepada masyarakat tepat waktu. Namun disayangkan terhambat oleh keterbatasan fasilitas peralatan produksi yang sudah jauh tertinggal secara teknologi yang disebabkan oleh kendala politik terkait anggaran yang berakibat pada pengadaan alat vital seperti kamera robotik belum dapat direalisasikan. Hal tersebut akibat dari pengadaan teknologi penunjang transparansi belum menjadi prioritas utama dalam penganggaran, sehingga inovasi digital yang dilakukan oleh TVR Parlemen belum maksimal.

Terkait dengan disposisi dan komunikasi antarorganisasi, para pelaksana kebijakan yakni TVR Parlemen menunjukkan bahwa memiliki pemahaman yang jelas terkait implementasi *Open Parliament* serta memiliki dedikasi juga kepatuhan yang tinggi kepada pimpinan, namun sikap tersebut memiliki dua dampak pada implementasi *Open Parliament*. Kepatuhan tersebut menghasilkan budaya kerja yang defensif dan cenderung melakukan pembatasan-pembatasan secara mandiri guna meminimalisir resiko politik. Selain itu, struktur birokrasi yang dijalankan di TVR Parlemen meskipun memiliki prosedur operasional yang terstruktur mulai dari rapat redaksi mingguan dan adanya *Newsroom* tetap memiliki celah untuk terjadi intervensi eksternal. Ketika terdapat arahan khusus dari Pimpinan atau Anggota DPR RI maka dapat membatasi atau membatalkan informasi yang akan disajikan. Hal ini menunjukkan lemahnya independensi peran TVR Parlemen dalam pelaksanaan *Open Parliament* yang bergantung pada kepentingan politik.

Selanjutnya, pilar-pilar dalam *Open Parliament* yaitu transparansi, partisipasi, inovasi, akuntabilitas dan inklusivitas. TVR Parlemen baru

berhasil pada tahap permukaan, pilar transparansi saat ini berjalan secara prosedural sebab *Youtube* DPR RI cenderung hadir sebagai saluran komunikasi satu arah. Kolom komentar yang seharusnya dapat menjadi ruang dialog tidak dikelola dengan maksimal sehingga komentar yang diberikan oleh masyarakat tidak mendapatkan timbal balik. Hal tersebut terjadi sebab adanya upaya untuk menghindari perdebatan. Disisi lain, pilar inklusivitas berjalan dengan penuh keterbatasan. Juru Bahasa Isyarat (Bisindo) hanya mampu dihadirkan dalam Rapat Paripurna sebab kendala biaya, sehingga hak bagi penyandang disabilitas terbatas dalam mengakses informasi rapat dan kegiatan DPR RI lainnya belum dapat dipenuhi. Dengan demikian, peran TVR Parlemen dalam menyediakan informasi publik sebagai wujud *Open Parliament* belum seutuhnya mencerminkan semangat *Open Parliament*, sebab adanya intervensi politik dan pembatasan dalam informasi sehingga konten yang disajikan tidak mampu mendorong terwujudnya *Open Parliament* meskipun TVR Parlemen telah berhasil sebagai pionir dalam digitalisasi parlemen, meraih berbagai penghargaan dan publik menilai cukup puas pada kinerja TVR Parlemen.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka muncul beberapa saran yang terbagi menjadi saran praktis dan saran teoritis, yaitu:

5.2.1 Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada TVR Parlemen dan seluruh tim Biro Pemberitaan Parlemen yang terlibat dalam pengelolaan *Youtube* DPR RI untuk melakukan evaluasi kembali terhadap pendekatan “jurnalisme positif” agar mampu menciptakan keseimbangan dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas, sehingga informasi yang disajikan tidak hanya memenuhi secara kuantitas namun juga memiliki kualitas yang baik, bukan sebagai alat pencitraan tetapi juga memenuhi hak publik atas informasi yang utuh dan objektif. Kemudian diperlukan pula

penyesuaian politik anggaran sehingga dapat memprioritaskan peremajaan teknologi juga peralatan produksi yang lebih merata di setiap Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan untuk menjamin kualitas siaran yang dihasilkan memenuhi standar profesional dan mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, dibutuhkan inovasi konten dalam *Youtube* DPR RI seperti video sorotan atau rangkuman rapat yang lebih mudah untuk dipahami masyarakat. Terakhir, untuk memaksimalkan inklusivitas dan partisipasi yang bermakna disarankan agar TVR Parlemen menambahkan fitur *closed caption* pada setiap video untuk penyandang disabilitas serta membangun mekanisme interaksi secara dua arah dengan merespons komentar publik serta mengintegrasikan tautan materi rapat dalam deskripsi video.

5.2.2 Saran Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pengembangan kajian selanjutnya disarankan agar meneliti lebih lanjut dalam studi ilmu politik dan kebijakan publik mengenai penerapan teori implementasi Van Meter dan Van Horn pada konteks digitalisasi pemerintah (*e-government*) memperdalam terkait indikator sumber daya dengan menempatkan variabel infrastruktur teknologi sebagai fokus utama. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mendalami analisis pengaruh politik anggaran dan intervensi elit politik yang terbukti mampu menghambat implementasi *Open Parliament*. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji aspek partisipasi politik dalam ruang digital untuk lebih memahami bahwa keterbukaan akses informasi secara otomatis sejalan dengan peningkatan partisipasi demokratis.